

PENINGKATAN KUALITAS SPK DALAM PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENGAYOMAN KEPADA MASYARAKAT

(Hasil Penelitian Analis Utama Rolitbang Polri)

1. Latar Belakang Masalah

Selama keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang sudah menjadi salah satu kebutuhan hidup setiaparganya yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terciptanya ketenteraman.

Masyarakat Indonesia dewasa ini sudah banyak mengalami kemajuan dalam pemikiran dan tindakan. Kesadaran hukum juga semakin meningkat, termasuk kesadaran akan hak-haknya sebagai warga negara, antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan publik dari instansi pemerintah.

Di sisi lain, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat masih banyak dikeluhkan, antara lain sikap tanggap/responsif, kecepatan pelayanan, kecepatan mendatangi TKP, termasuk juga kualitas dan perilaku personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih belum memenuhi harapan.

Kondisi tersebut mendorong Polri untuk membenahi diri, berupaya meningkatkan kinerjanya pada tugas-tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sentra Pelayanan Kepolisian pada kesatuan ewilayahan, baik di tingkat Polres maupun Polsek, adalah pintu gerbang pelayanan Polri untuk melihat kinerja dan permasalahan yang ada, upaya meningkatkannya, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Apakah kinerja Sentra Pelayanan Kepolisian di kesatuan kewilayahan sudah cukup memadai untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- Permasalahan apa saja yang mempengaruhi kinerja SPK ?

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka variabel penelitian adalah :

- Kinerja SPK yang baik, dengan indikator :
 - Masyarakat merasa mendapat perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang baik dari Polri.
 - Anggota SPK cukup memaknai tentang profesinya, visi dan misi serta organisasinya sendiri.
 - Anggota SPK mampu berkomunikasi dengan baik pada saat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
 - Anggota SPK cepat tanggap memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang diminta oleh masyarakat termasuk mendatangi TKP.
- Faktor yang mendukung kinerja SPK :
 - Ruang perkantoran yang memadai.
 - Sarana transportasi, komunikasi dan persenjataan cukup memadai.
 - Kesejahteraan personil relatif cukup.

2. Rumusan Masalah

Tersurat pada akhir latar belakang masalah, masalah yang diteliti adalah upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengayoman dan pelayanan anggota SPK kepada masyarakat. Karena kualitas perlindungan, pengayoman dan pelayanan tersebut bergantung pada kualitas SDM anggota SPK, kuantitas dan kualitas sarana dengan prasarana yang dimiliki SPK, profesionalitas dan

kemampuan anggota SPK dalam menyelesaikan tugas-tugas kepolisian, maka masalah-masalah yang akan diidentifikasi adalah,

- Bagaimana kekuatan personil SPK pada saat ini ? Apakah sudah sesuai dengan DSPP dan memenuhi syarat kecukupan ? Jika belum, maka berapa kekuatan riel yang diinginkan ?
- Bagaimana kekuatan anggota Satuan Kerja yang akan mendukung kinerja SPK ? Apakah sudah memenuhi syarat kecukupan dan kememadaiannya ? Jika belum, maka berapa kekuatan riel yang diinginkan ?
- Bagaimana kualitas SDM anggota SPK ditelaah dari segi : pendidikan formal, pendidikan kepolisian, kemampuan berkomunikasi insani, kemampuan menangani dan mengamankan TKP, apakah sudah memenuhi syarat kememadaiannya ? Jika belum, maka bagaimana bentuk proses untuk memenuhinya ?
- Bagaimana kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional SPK ? Apakah sudah memenuhi syarat kecukupan, kememadaiannya, dan kelayakan ? Jika belum, maka bagaimana idealnya ?
- Bagaimana pendapat pimpinan Polri di tingkat Polres dan Polsek, masyarakat, dan petugas sendiri, mengenai kualitas perlindungan, pengayoman dan pelayanan Polri, khususnya anggota SPK ?
- Apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat dari Polri untuk saat ini ?

3. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Penelitian

Selaras dengan latar belakang dan rumusan masalah, maksud dari penelitian ini adalah "menelaah kuantitas dan kualitas personil SPK pada saat ini, sebagai unsur Polri yang terdepan dalam menghadapi pengaduan masyarakat mengenai gangguan kamtibmas", dengan tujuan "mendapatkan informasi mengenai upaya optimal dalam meningkatkan bantuan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", sehingga dapat dirumuskan strategi Polri untuk meningkatkan profesionalitas SPK sebagai pelayan masyarakat yang baik dan dapat diandalkan.

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat bagi :

- Kepolisian

Dimilikinya data (informasi) mengenai kekurangan dan kelebihan SPK pada saat ini baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas SPK, sehingga menjadi SPK yang dapat menangani setiap gangguan kamtibmas secara efektif dan efisien.
- Masyarakat

Mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani tatanan kehidupan dan penghidupannya, karena kepolisian akan selalu siap menjaga kamtibmas, menerima dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapinya.

4. Ruang Lingkup

Tersurat pada maksud dan tujuan penelitian, yaitu menelaah kondisi SPK pada saat ini dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan profesionalitas anggotanya, sehingga Polri, khususnya anggota SPK beserta jajaran Satuan Kerjanya, dapat menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Seperti sudah dikemukakan, aspek yang mendukung kinerja dan

profesionalitas anggota SPK, diantaranya adalah kekuatan personil beserta jajarannya, kualitas, dan profesionalitas SDM, sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah telaahan tentang

- Kuantitas dan kualitas anggota SPK, pada saat ini.
- Kuantitas dan kualitas sarana dengan prasarana pendukung operasional SPK pada saat ini.
- Dipenuhi-tidaknya syarat kecukupan dan kememadaiannya personil, sarana dan prasarana untuk proses perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Kuantitas dan kualitas ideal personil SPK beserta sarana dan prasarananya.
- Kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan profesionalitas anggota SPK, ditelaah dari aspek perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

5. Metode Penelitian

a. Sampel dan Responden

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel purposif, dengan proses pengambilannya dalam tiga tahap sebagai berikut,

- Menentukan 10 Polda sebagai sampel,
- Pada masing-masing Polda sampel diambil sampel Polres disesuaikan dengan banyaknya Polres pada Polda sampel tersebut,
- Pada masing-masing Polres sampel, diambil sampel Polsek disesuaikan dengan banyaknya Polsek yang ada pada Polres yang dijadikan sampel.

Responden pada penelitian dibagi atas tiga kelompok, yaitu

- Pimpinan, yang terdiri atas Ka Polres atau yang mewakilinya (1 orang), Ka SPK Polres (3 orang), Ka Polsek atau yang mewakilinya (3 orang), sehingga jumlah responden Pimpinan 7 orang.
- Anggota SPK, yang terdiri atas Bamin, anggota Samapta, Lantas, Reskrim, dan Intelkam, dengan jumlah keseluruhannya 20 orang.
- Masyarakat yang pernah berurusan dengan polisi, yang jumlahnya 20 orang.

Polda dan Polres yang dijadikan sampel, dengan respondennya disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 1
Polda dan Polres Sampel beserta Jumlah Respondennya

POLDA	POLRES	RESPONDEN		
		PIMPINAN	ANGGOTA	MASYARAKAT
Sumatra Barat	Kota Bear Pading	3	20	20
	Passer Selatan	3	20	20
	Parliament	3	18	15
	Kota Parliament	3	18	15
	Agama	3	20	19
	Kota Bucketing	3	20	11
	Kota Padding	3	20	16
	Panging			
	Kota Payakumbuh	3	20	20
	Jumlah		24	153

POLDA	POLRES	RESPONDEN			
		PIMPINAN	ANGGOTA	MASYARAKAT	
Sumatra Selatan	Kota Bear Palembang	5	30	28	
	MAUBA	4	20	24	
	UKU Timur	5	15	16	
	UKU	3	19	27	
	Urgan Uar	3	20	20	
	UKU	4	23	16	
	UKU Selatan	9	32	7	
	Prabumulih	3	15	21	
	Jumlah		41	174	159
	Bengkulu	Kota Bengkulu	7	19	9
Seluma		5	25	14	
Bengkulu Selatan		5	23	13	
Kaur		5	17	20	
Bengkulu Utara		7	19	17	
Labong		12	12	21	
Rejang Lebong		10	9	17	
Kepahyang		5	15	20	
Jumlah			56	134	131

Bengkulu	Kota Bengkulu	7	19	9	
	Seluma	5	25	14	
	Bengkulu Selatan	5	23	13	
	Kaur	5	17	20	
	Bengkulu Utara	7	19	17	
	Labong	12	12	21	
	Rejang Lebong	10	9	17	
	Kepahyang	5	15	20	
	Jumlah		56	134	131
	Jambi	Kota Jambi	4	9	12
Batangan		5	17	13	
Merangin		12	14	11	
Sarolangun		7	17	10	
Musro Jambi		7	16	9	
Tanjung Jabung Timur		9	13	17	
Tanjung Jabung Barat		10	15	20	
Jumlah			55	101	92
Bangka Belitung	Bangka	5	21	6	
	Bangka Barat	4	14	6	
	Bangka Selatan	5	16	10	
	Bangka Tengah	4	20	12	
	Kota Bangka	7	18	10	
	Belitung	7	19	11	
	Jumlah		33	103	55
Kalimantan Selatan	Kota Bear Banjarmasin	5	17	15	
	Kota Banjarbaru	5	12	12	
	Banyar	7	13	15	
	Tanah Laut	7	10	20	
	Lapin	8	21	15	
	Hulu Sungai Selatan	7	6	22	
	Hulu Sungai Tengah	5	27	12	
	Bante Kuala	5	20	18	
	Jumlah		53	125	130

POLDA	POLRES	RESPONDEN			
		PIMPINAN	ANGGOTA	MASYARAKAT	
Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	8	25	13	
	Konawe Selatan	4	20	8	
	Konawe	8	30	20	
	Konaka	3	38	16	
	Muna	8	20	20	
	Bau Bau	3	18	15	
	Buana	5	19	16	
	Jumlah		50	170	108
	Jawa Barat	Kota Cimahi	4	22	5
		Bandung	11	13	13
Kota Cirebon		7	16	18	
Kuningan		7	20	18	
Kota Tasikmalaya		7	22	20	
Ciamis		7	18	6	
Subang		8	18	21	
Purwakarta		7	20	6	
Bogor		7	14	6	
Karawang		5	11	25	
Kota Bogor		8	20	19	
Sukabumi		7	20	20	
Cianjur		7	20	20	
Jumlah		95	252	211	
Banten	Kota Cilegon	9	15	23	
	Serang	8	23	11	
	Pandeglang	8	18	21	
	Lebak	13	16	20	
	Jumlah		38	73	75
Metro Jaya	Metro Tangerang	8	15	13	
	Metro Jakarta Selatan	8	15	1	
	Metro Jakarta Barat	8	15	16	
	Metro Bekasi	7	15	16	
	Bekasi	8	16	15	
	Jumlah		39	76	61
Jumlah Seluruhnya		484	1667	1150	

Tabel 1 (lanjutan)

b. Metode Pengumpulan Data

Data untuk keperluan analisis dilakukan dengan

- Membagikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada kelompok responden tersebut, yang semuanya dikumpulkan di Aula (Ruang Pertemuan/Ruang Rapat) yang ada di Polres sampel, dan setelah diisi dengan lengkap dikumpulkan kembali pada saat itu juga.
- Wawancara dengan beberapa responden.
- Pengamatan lapangan mengenai :
 - Kondisi ruang SPK dengan Satuan Fungsi (Satfung), yaitu Satuan Samapta (Sabhara), Lantas, Intelkam, dan Reskrim.
 - Tata letak ruang SPK dengan Satfung.
 - Sarana dan prasarana SPK.
 - Personil jaga dan piket fungsi.
 - Sistem pelaporan.
 - Sistem komunikasi antara SPK dengan personil jaga dan piket fungsi,
 - Komunikasi Ka SPK dengan Ka Satfung.

- 4) Data sekunder mengenai laporan bulanan tentang tindak kejahatan dan hasil penyelesaiannya, dari Januari 2006 sampai Mei 2006.

6. Analisis Data

Data dianalisis dengan proses sebagai berikut :

- a. Untuk data hasil dari jawaban kuesioner, dilakukan tabulasi dan perhitungan mengenai
- 1) Jumlah personil SPK dengan Satfungsnya, sarana dan prasarana yang ada saat ini.
 - 2) Kesesuaian dan kememadaian personil dengan sarana dan prasarana.
 - 3) Kebutuhan riel personil dengan sarana dan prasarananya.
 - 4) Analisis skor dan proporsi tentang :
 - a) Pengetahuan dan pemahaman anggota SPK mengenai organisasi kepolisian, peran dan fungsi polisi.
 - b) Kualitas SDM ditelaah dari pendidikan formal dan pendidikan kejuruan kepolisian
 - c) Kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman, berdasarkan pendapat pimpinan, masyarakat, dan petugas sendiri.
 - 5) Subtansi saran dan harapan masyarakat pada kinerja dan profesionalitas petugas SPK.
 - b) Untuk data hasil wawancara dan pengamatan lapangan ditelaah secara kualitatif dan kuantitatif untuk melengkapi hasil analisis tabulasi data dari kuesioner.
 - c) Telaah lanjut untuk pembuatan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data primer (data dari jawaban kuesioner), wawancara, pengamatan lapangan, dan data sekunder.

7. Hasil dan Pembahasan

a. Struktur Responden

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh setiap kelompok responden, maka struktur responden berdasarkan kelompoknya seperti di bawah ini.

1). Responden Pimpinan

DIK FORMAL	DIKPOL	LAMA MENJADI PIMPINAN (thn)			
		<1	1-3	3-5	>5
SMU/SMK	SPN	70	37	8	11
	SECAPA	29	24	7	2
	AKPOL	32	11		3
	PTIK	1	1		1
	SELAPA	2	1		
	SESPIM		2		
DIPLOMA	SESPATI				
	SPN				
	SECAPA		1		
	AKPOL	4	1	1	
	PTIK				
	SELAPA				
SARJANA	SESPATI				
	SPN	2	3		
	SECAPA	10	8	3	1
	AKPOL	2	2	2	
	PTIK	3	3		
	SELAPA				
PASCA SARJANA	SESPATI				
	SPN				
	SECAPA				
	AKPOL		1		
	PTIK		1		
	SESPIM	6			

2) Responden Anggota

USIA (thn)	DIK FORMAL	LAMA DINAS (thn)			
		<1	1-3	3-5	>5
< 20	SMU/SMK	27	20		2
	DIPLOMA	1	3		
	SARJANA	1	1		
	PASCA		1		
20 - 25	SMU/SMK	66	171	40	17
	DIPLOMA	6	16	1	
	SARJANA	1	7	5	1
	PASCA		1		
26 - 30	SMU/SMK	47	45	37	57
	DIPLOMA		1	1	6
	SARJANA	6	7	1	6
	PASCA				
31 - 35	SMU/SMK	19	12	1	44
	DIPLOMA	2			7
	SARJANA	7	1		5
	PASCA				
35 - 40	SMU/SMK	11	6		30
	DIPLOMA	2	1		2
	SARJANA	1			5
	PASCA				
> 40	SMU/SMK	54	32	2	89
	DIPLOMA	3	2	1	1
	SARJANA	9			5
	PASCA				1

3) Responden Masyarakat

PEKERJAAN	USIA	PENDIDIKAN					
		SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	SARJANA	PASCA
PELAJAR	< 20			3			
	20 - 25						
	26 - 30						
	31 - 35						
	36 - 40						
	> 40						
MAHASISWA	< 20				36		
	20 - 25					15	1
	26 - 30						
	31 - 35						
	36 - 40						
	> 40						
IBU RUMAH TANGGA	< 20						
	20 - 25		4	3			
	26 - 30	2	17	4	1		
	31 - 35		1	8	1		
	36 - 40		1	1		1	
	> 40	1	1	13		1	
PEGAWAI SWASTA	< 20			4	1		
	20 - 25	2		8		1	
	26 - 30	1	2	5	4		
	31 - 35	3	5	8	5	3	
	36 - 40	13	1	18		2	
	> 40	28	14	23	1	1	
PROFESIONAL	< 20					5	
	20 - 25						
	26 - 30					21	
	31 - 35					1	
	36 - 40					6	
	> 40					8	
PNS	< 20	1					
	20 - 25			1			
	26 - 30		1	1	1		
	31 - 35		17	2	2		
	36 - 40		5	1	1	2	
	> 40		10	3	3	1	
WIRASWASTA	< 20	1	2	2			
	20 - 25		8	8	3	1	
	26 - 30	5	17	16	9	1	
	31 - 35	1	5	17	3		
	36 - 40	3	8	16	1	1	
	> 40	29	11	31	3	4	
GURU/DOSEN	< 20						
	20 - 25						
	26 - 30						
	31 - 35						
	36 - 40			2	1	1	
	> 40			2	5		4
ANGGOTA TNI	< 20			1			
	20 - 25			1	1		
	26 - 30						
	31 - 35			1			
	36 - 40						
	> 40			21			
LAINNYA	< 20	1					
	20 - 25	1	2	7	1		
	26 - 30	1	4	6	1		
	31 - 35	5	2	2	1		
	36 - 40		7	2			
	> 40	11	10	21	2		

b Kondisi SPK

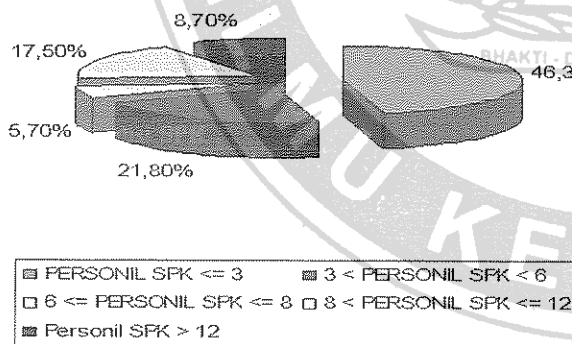
Berdasarkan hasil isian kuesioner, wawancara, dan pengamatan lapangan, setelah digabungkan, diolah, dan dianalisis dengan menggunakan paket program SPSS, diperoleh deskripsi statistis untuk SPK pada saat ini sebagai berikut,

TABEL 1
Statistik SPK Pada Saat ini

Koran Statistics	Inlay
Rata-Rata Hitting	6,61
Modus	4
Median	3
Impinging Baku	6,586
Inlay Minimum	1
Inlay Maximum	42

Pada Tabel 1 tersurat,

- 1) Jumlah personil SPK pada Mako Polri (Polsek atau Polres) saat ini, antara 1 (satu) orang (ada pada beberapa Polsek di luar Jawa, terutama Polsek baru/pemekaran), sampai 42 orang (ada pada beberapa Polres, terutama yang berada di Jawa).
- 2) 50% Polsek memiliki anggota SPK, termasuk Ka SPK, antara 1 sampai 3 orang, dan 50% lagi lebih dari 3 orang, yang sebagian besar terdiri atas 4 orang personil.
- 3) Jika ditelaah dari rata-rata hitung dan simpangan bakunya, maka secara umum, 50% Polres memiliki personil SPK (termasuk Ka SPK) antara 6 sampai 8 orang, (kondisi ini banyak terdapat di luar Jawa), sedangkan 50% lagi antara 4 sampai 26 orang, (kondisi ini umumnya terdapat di P. Jawa).
- 4) Gambaran proporsional personil SPK, sebagai rangkuman dari paparan suratan 1 – 3 adalah seperti di bawah ini



Gambar 1
Gambaran Proporsional Personil SPK Saat Ini

Gambar 1 menyajikan kondisi personil SPK pada saat ini, sebagian besar Mako Polri (46,30%) personil SPK-nya paling banyak 3 orang, 21,80% antara 4 sampai 5 orang, 5,70% antara 6 sampai 8 orang, 17,50% antara 9 sampai 12 orang, dan yang lainnya lebih dari 12 orang

Jika kondisi personil SPK tersebut dihubungkan dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/7/1/2005, yang menyajikan DSPP SPK seperti di bawah ini

TABEL 2
DSPP SPK Berdasarkan
Skep Kapolri No. Pol. : KEP/7/1/2005

Unit Mako Polri	Jumlah Personil (orang)
Polres Tipe A1	18
Polres Tipe A1K	18
Polres Tipe A2	15
Polres Tipe B1	12
Polres Tipe B2	12
Polres Persiapan	12
Polsek Tipe A	12
Polsek Tipe B1	9
Polsek Tipe B2	3

yang berarti, di tingkat Polsek, anggota SPK, termasuk Ka SPK harus antara 3 sampai 12 orang, dan di tingkat Polres antara 12 sampai 18 orang, dengan tugas dan kewajibannya adalah

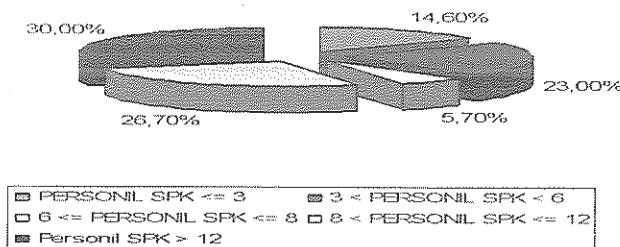
- 1) Melayani pelaporan/pengaduan masyarakat.
- 2) Menjaga Mako Polri, tahanan, dan barang bukti.
- 3) Menyelesaikan tindak pidana ringan pada masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada pada organisasi kepolisian.

maka kondisi personil SPK pada saat ini jika dihubungkan dengan DSPP beserta tugas dan kewajibannya seperti tersurat pada Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/7/1/2005 tersebut, belum memenuhi syarat kecukupan dan kemandirian. Dan hal ini didukung oleh pendapat Pimpinan Polri di tingkat Polres dan Polsek, sebab mereka berpendapat untuk saat ini, idealnya personil SPK dengan statistik seperti di bawah ini

TABEL 3
Statistik SPK Yang Diinginkan

Ukuran Statistis	Nilai
Rata-Rata Hitung	9,81
Modus	8
Median	3
Simpangan Baku	7,284
Nilai Minimum	1
Nilai Maksimum	45

Pada Tabel 3 tersurat, Pimpinan Polri di tingkat Polsek dan Polres berpendapat, jumlah personil SPK, termasuk Ka SPK, dalam setiap *shiftnya* di tingkat Polsek sebaiknya antara 3 (tiga) sampai 8 (delapan) orang, dan di tingkat Polres antara 11 orang sampai 15 orang, dengan rata-rata ideal antara 8 orang sampai 12 orang. Sehingga jika digambarkan proporsi idealnya, maka diperoleh gambaran seperti di bawah ini



GAMBAR 2

Gambaran Proporsional Personil SPK Yang Diinginkan Pimpinan Polri di Tingkat Polsek dan Polres

Gambar 2 menyajikan pendapat Pimpinan Polri di Polres dan Polsek mengenai idealnya personil SPK dalam setiap *shifftnya*. 30% menginginkan lebih dari 12 orang, 26,7% antara 9 sampai 12 orang, 5,7% antara 6 sampai 8 orang, 23% antara 4 sampai 5 orang, dan 14,6% paling banyak 3 orang

Kekuatan SPK dalam setiap *shifftnya* antara 8 orang dengan 12 orang, untuk saat ini, cukup ideal, sebab dengan jumlah seperti itu, dapat dilakukan distribusi tugas sebagai berikut : 1 – 2 orang melayani pelaporan dan pengaduan, 3 – 5 orang menjaga tahanan, dan 4 – 5 orang menjaga Mako dan barang bukti, dengan 2 – 3 orang dapat diperbantukan pada Piket Fungsi, jika memerlukan tambahan anggota untuk keperluan penyidikan atau tindak pengamanan TKP.

c. Sarana dan Prasarana

Kinerja SPK tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang layak dan memadai. Berdasarkan data primer (hasil isian kuesioner responden pimpinan) dan pengamatan lapangan, statistik sarana SPK pada saat ini adalah seperti di bawah ini

TABEL 4
Statistik Sarana SPK Saat Ini

Jumlah Yang	Statistik	Ranmor		Senpi		Alkom		Alsintor	
		R4	R2	LPj	LPd			Sintik	PC
Dimiliki	Modus	1	0	0	1	2	1	1	1
	Median	1	4	2	5	2	1	1	1
	Rata-rata	4,23	19,07	14,64	43,79	9,91	5,95	5,62	
	Kekeliruan baku rata-rata	0,683	2,621	2,170	6,408	1,241	1,003	0,600	
	Simpangan baku	16,134	44,256	36,115	112,636	22,200	16,513	10,748	
Layak Pakai	Modus	1	0	0	1	1	1	1	1
	Median	1	4	2	5	2	1	1	1
	Rata-rata	3,89	17,09	12,45	42,67	9,10	4,45	5,27	
	Kekeliruan baku rata-rata	0,635	2,416	2,019	6,331	1,139	0,676	0,551	
	Simpangan baku	14,320	41,360	33,638	111,106	20,345	11,105	9,839	

Keterangan : Ranmor R4 : Kendaraan bermotor roda empat,
Ranmor R2 : Kendaraan bermotor roda dua,
Senpi LPj : Senjata api laras panjang
Senpi LPd : Senjata api laras pendek
Alkom : Alat komunikasi
Altul MT : Alat tulis, mesin tulis (mesin tik)
Altul Kom : Alat tulis, komputer

Pada Tabel 4 tersurat, sarana penunjang operasional SPK untuk keperluan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat pada saat ini, seperti di bawah ini

TABEL 5
Rata-Rata Kepemilikan dan Yang Layak Pakai Sarana Operasional Saat Ini

Jenis sarana	Rata-Rata	Polsek	Polres
Mobil	Dimiliki	0 – 1	2 – 7
	Layak pakai	0 – 1	1 – 6
Speda motor	Dimiliki	0 – 4	11 – 27
	Layak pakai	0 – 4	9 – 24
Senpi bahu	Dimiliki	0 – 2	8 – 21
	Layak pakai	0 – 2	6 – 19
Senpi genggam	Dimiliki	1 – 5	24 – 63
	Layak pakai	1 – 5	23 – 62
Alat komunikasi	Dimiliki	0 – 2	6 – 14
	Layak pakai	1 – 2	5 – 12
Mesin ketik	Dimiliki	0 – 1	2 – 9
	Layak pakai	0 – 1	2 – 6
Komputer personal	Dimiliki	0 – 1	4 – 7
	Layak pakai	0 – 1	2 – 6

- 1) Kendaraan bermotor,
Sebagian besar Polsek hanya memiliki 1 mobil, tetapi ada yang tidak memiliki speda motor, dan jika memiliki paling banyak 4 unit, sedangkan Polres rata-rata memiliki mobil antara 2 sampai 7 unit, dan speda motor antara 11 sampai 27 unit, dengan yang layak pakai, untuk mobil antara 1 sampai 6 unit, dan untuk speda motor antara 9 sampai 24 unit.
- 2) Senjata api (Senpi),
Sebagian besar Polsek tidak memiliki senpi bahu, dan jika memiliki paling banyak 2 pucuk, sedangkan senpi genggam sebagian besar hanya 1 pucuk, dan jika lebih paling banyak 5 pucuk. Di Polres rata-rata memiliki senpi bahu antara 8 sampai 21 pucuk, senpi genggam antara 24 sampai 63 pucuk, dengan yang layak pakai, untuk senpi bahu antara 6 sampai 19 pucuk, dan senpi genggam antara 23 sampai 62 pucuk.
- 3) Alat komunikasi
Sebagian besar Polsek hanya memiliki 2 unit, yang pada umumnya berupa *handy talky* (HT), dan salah satu diantaranya tidak layak pakai. Polres rata-rata memiliki alat komunikasi dalam bentuk HT dan radio gelombang pendek (*short system band*, SSB) antara 6 sampai 14 unit, dengan yang layak pakai antara 5 sampai 12 unit. Untuk HT pada umumnya dipegang oleh para Kepala (KSPK, Kasatfung, Kabagops), sedangkan anggota patroli hanya sebagian kecil yang memegang (dibekali) HT. Kondisi ini banyak ditemukan di kepolisian di luar Jawa, sedangkan di Jawa, pada umumnya pengendali operasi dan anggota operasional masing-masing dibekali HT, dan diserahkan pada setiap pergantian regu jaga/piket.

- 4) Alat tulis pelaporan
Alat untuk menulis laporan temuan dan pengaduan masyarakat oleh Bamin SPK umumnya sudah menggunakan komputer, sedangkan mesin ketik digunakan jika komputer tidak bisa dioperasikan. Setiap Polsek pada umumnya memiliki 1 unit komputer, dan hanya sebagian kecil yang tidak memiliki komputer. SPK Polres hampir semuanya memiliki komputer, dan sebagian besar hanya memiliki 1 unit, sedangkan secara keseluruhan Polres memiliki komputer antara 4 sampai 7 unit, dengan yang layak pakai antara 3 sampai 6 unit, sedangkan mesin ketik antara 2 sampai 9 unit, dengan yang layak pakai antara 2 sampai 6 unit.
Kondisi kuantitas dan kualitas sarana penunjang operasional pada saat ini, menurut sebagian besar (60,69%) Pimpinan Polri di Polsek dan Polres masih belum memenuhi syarat kecukupan dan kemediaan, sebab mereka menginginkan kuantitas sarana tersebut harus seperti di bawah ini.

TABEL 6
Kuantitas Rata-Rata Sarana Operasional Yang Diinginkan Saat Ini

No	Lemdik	Banyak siswa yang sakit (orang)				
		Minggu-1	Minggu-2	Minggu-3	Minggu-4	Minggu-5
1	Sepolwan angk. XXXIV	40	46	115	61	100
2	SPN Lido angk. XXXI	36	48	39	32	71
3	Akpol angk. XLI	59	59	56	63	79

Sumber : Poliklinik Sepolwan, SPN Lido, Akpol

d. Keorganisasian

Berdasarkan hasil jawaban mengenai penilaian pimpinan dan masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman petugas SPK pada organisasi kepolisian, dan pendapat petugas SPK sendiri, diperoleh fakta seperti pada Tabel 7 di bawah ini.

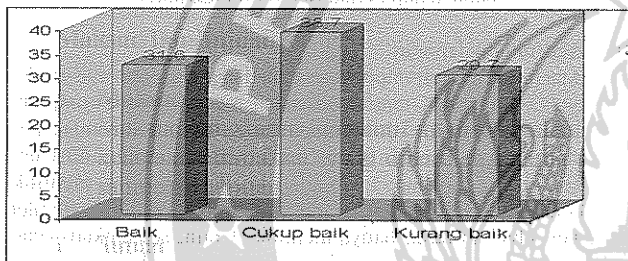
TABEL 7

Proporsi Anggota SPK Yang Mengetahui dan Memahami Tentang Organisasi Kepolisian

Lemdik	Banyak siswa yang sakit	
	Selang waktu	Jumlah (orang)
Sepolwan angk. XXXIII	Maret 2006	302
	April 2006	177
	Mei 2006	248
	Juni 2006	109
SPN Lido angk. XXX	Masa dasrit	191
	Masa diktuk	646

Sumber : Poliklinik Sepolwan dan SPN Lido

Tabel 7 menyajikan pendapat responden mengenai pengetahuan dan pemahaman anggota SPK terhadap peran dan fungsi organisasi kepolisian. Anggota SPK yang sudah baik dalam pengetahuan dan pemahamannya, berdasarkan pendapat Pimpinan Polri di Polres/Polsek baru 9,45%, sedangkan menurut masyarakat 7,5%, dan menurut anggota 24,1%. Sedangkan dalam taraf cukup, menurut pimpinan 84,4%, menurut masyarakat 80,0%, dan menurut anggota 56,4%. Yang belum baik menurut pimpinan 6,15%, menurut masyarakat 12,5%, dan menurut anggota 19,5%. Jika ketiga pendapat tersebut dihitung rata-rata kumulatifnya, maka diperoleh gambaran proporsional seperti di bawah ini



GAMBAR 3

Gambaran Proporsional Pengetahuan dan Pemahaman Anggota SPK

Terhadap Peran dan Fungsi Organisasi Kepolisian

Gambar 3 menyajikan kondisi pengetahuan dan pemahaman anggota SPK masih pada taraf cukup, sehingga upaya peningkatan profesionalitas dan kinerja harus selalu dilakukan oleh pimpinan Polri melalui penyuluhan, pembinaan, dan proses pembelajaran.

e. Kualitas SDM

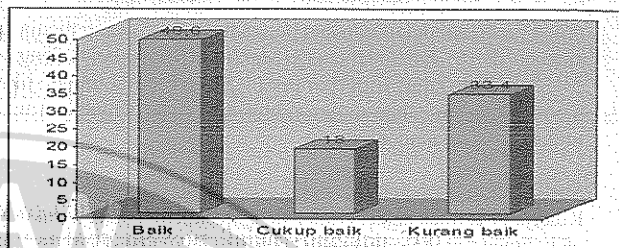
Berdasarkan jawaban responden, statistik kualitas SDM polisi, khusus yang berhubungan langsung dengan masyarakat, secara proporsional seperti di bawah ini

TABEL 8

Proporsi Penilaian Responden Terhadap Kualitas SDM Anggota Polisi Yang Berhubungan Langsung Dengan Masyarakat

Responden	Prosentase (%)		
	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
Siswataruna peserta dikdas bhara	24	40,5	40,1
Taruna Tk. 1, 2, 3	0	80,5	11,5

Tabel 8 menyajikan pendapat responden mengenai SDM anggota polisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Anggota dengan kualitas SDM baik, menurut responden pimpinan ada 41,2%, menurut masyarakat 50%, dan menurut anggota sendiri 54,7%. Sedangkan pada taraf cukup, menurut pimpinan ada 27,8%, menurut masyarakat 13,2%, dan menurut anggota 12,9%, dan pada taraf kurang baik menurut pimpinan ada 31,0%, menurut masyarakat 36,8%, dan menurut anggota 32,4%. Jika dikumulatikan dan dirata-ratakan, maka secara proporsional kualitas SDM anggota SPK adalah seperti di bawah ini.



GAMBAR 4

Gambaran Proporsional Kualitas SDM Anggota SPK

Berdasarkan Gambar 4, kualitas SDM anggota SPK relatif sudah baik, tetapi masih diperlukan suatu proses pembelajaran, penyuluhan, dan pembinaan anggota secara berkala, bersinambungan, dan berjenjang.

f. Kualitas Peran dan Fungsi

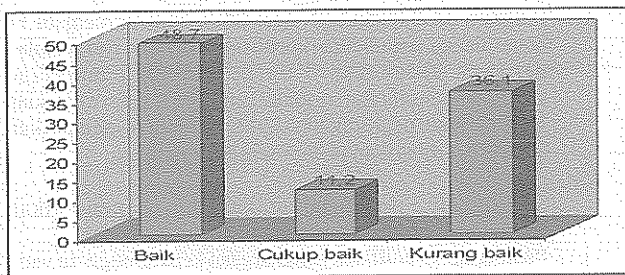
Tersurat pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, peran dan fungsi polisi adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari hasil kumulatif jawaban responden pimpinan, petugas, dan masyarakat, mengenai kualitas penerapan peran dan fungsi polisi dari anggota SPK, diperoleh data mengenai kualitas penerapannya secara proporsional seperti di bawah ini.

TABEL 9

Proporsi Kumulatif Anggota SPK Mengenai Kualitas Penerapan Peran dan Fungsi Polisi

Sikap	Prosentase (%)		
	Siswa/Taruna peserta dikdas bhara	Taruna Tk. 1, 2, 3	Rata-Rata
Melakukan balas den-dam	10,3	3,7	7
Menerima sebagai bagian dari pendidikan	44,4	11,5	27,95
Melakukan introspeksi	42,7	73,3	58
Melakukan komunikasi insani	2,6	11,5	7,05

Tabel 9 menyajikan pendapat Pimpinan Poldi di Polres dan Polsek bahwa 55,7% anggota SPK sudah baik dalam menerapkan peran dan fungsi kepolisian, sedangkan 14,5% baru pada taraf cukup, dan sisanya belum baik. Masyarakat sendiri menilai 42,4% anggota SPK sudah baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, 19,5% pada taraf cukup. Sedangkan menurut anggota SPK sendiri yang sudah baik dalam menjalankan peran dan fungsi kepolisian ada 47,9%, sedangkan 11,7% pada taraf cukup, dan yang lainnya masih belum baik. Jika pendapat-pendapat tersebut dikumulatikan, maka diperoleh gambaran proporsional seperti di bawah ini.



GAMBAR 5

Gambaran Proporsional Anggota SPK
Dalam menerapkan Peran dan Fungsi Kepolisian

Pada Gambar 5 tersurat kualitas/kemampuan anggota SPK menerapkan peran dan fungsi kepolisian dalam tugas-tugasnya, yang berpredikat kurang baik masih sebanding dengan yang baik, sehingga diperlukan inovasi Pimpinan Polri untuk memberikan motivasi pada anggotanya agar mau meningkatkan kualitas kerja dan profesionalitasnya

g. Pendapat dan Harapan Masyarakat

Untuk meningkatkan peran polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dalam penelitian ini responden masyarakat diharapkan menyampaikan masukan mengenai pendapat dan harapannya pada kepolisian, dan dari sekian banyak saran yang disampaikan, substansinya adalah seperti di bawah ini

- 1) Dari segi pelayanan SPK sudah melakukannya dengan baik, hanya dari segi perlindungan dan pengayoman masih kurang baik, karena polisi masih sering terlambat dalam mendatangi TKP dan proses penyelesaian kasus sering tidak tuntas.
- 2) Patroli polisi diharapkan frekuensinya tinggi dan menjangkau pelokso pemukiman, terutama daerah-daerah rawan kamtibmas.
- 3) Pembinaan kepada polisi muda agar diintensifkan, karena masyarakat menilai banyak polisi muda yang berperilaku kurang baik dan tidak ramah.
- 4) Profesionalitas dan kinerja polisi agar selalu ditingkatkan dan diperbaiki.
- 5) Tindakan polisi kepada pelanggar lalu-lintas agar tegas dan tidak pilih-kasih.
- 6) Pengetahuan dan pemahaman polisi terhadap ketentuan perundang-undangan dan *leasing* agar ditingkatkan.
- 7) Kuantitas dan kualitas personil dan sarana operasional agar ditingkatkan secara berjenjang dan proporsional.
- 8) Polisi agar menghilangkan sikap dan perilaku seperti militer.
- 9) Pengawasan dan pengendalian jalan-jalan yang rawan kemacetan agar ditingkatkan, dengan memperbanyak petugas polisi lintas.
- 10) Kesejahteraan petugas agar ditingkatkan, supaya "polisi nakal" berkurang.
- 11) Penerimaan anggota polisi agar memperhatikan juga lulusan-lulusan dari madrasah Aliyah, sebab pada saat ini kecenderungan yang diterima hanya lulusan SMU.
- 12) Peran dan fungsi Babinkamtibmas agar ditumbuh-kembangkan, sehingga mereka dapat dijadikan mediator masyarakat dengan kepolisian.
- 13) Silaturahmi polisi dengan masyarakat agar dilakukan secara rutin dan berkala, sehingga bisa dijadikan ajang "sambung-rasa" dan "urun-rembug" untuk meningkatkan dan menjaga kamtibmas.

8. Kesimpulan

- a. Pada umumnya masyarakat berpendapat, dari segi pelayanan, SPK sudah melakukannya dengan cukup

baik, karena

- 1) Jika mendatangi kantor polisi untuk melakukan pelaporan/pengaduan petugas selalu ada dan siap untuk melayani.
 - 2) Berperilaku sopan dan ramah, walaupun masih ada petugas yang bersikap "kaku" pada waktu menerima masyarakat yang melapor (pengaduan) kasus kamtibmas, kejadian perkara, atau bencana.
- b. Dari segi perlindungan dan pengayoman, masyarakat berpendapat, SPK belum bisa melakukan dengan cukup baik karena
 - 1) Petugas sering terlambat untuk mendatangi TKP.
 - 2) Masih ada petugas yang kurang trampil dalam tindak pengamanan TKP.
 - 3) Sering lambatnya penanganan dan penyelesaian kasus kamtibmas.
 - 4) Patroli polisi masih terbatas pada pengamanan jalan raya dan pemukiman penduduk di sekitar jalan raya, padahal masyarakat menginginkan patroli polisi di pelokso pemukiman, terutama di daerah rawan kamtibmas.
 - 5) Tingkat keyakinan bahwa kasus dapat diselesaikan masih rendah.
 - c. Masyarakat menginginkan adanya "silaturahmi" rutin dan berkala pihak kepolisian kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami mengenai tugas dan peran polisi, disamping sebagai ajang "rembug rasa dan pendapat" dalam menangani kasus dan persoalan kamtibmas.
 - d. Ruang pelayanan SPK di luar Jawa pada umumnya masih belum memadai dan memenuhi kenyamanan bagi masyarakat pelapor, sedangkan di Jawa dari segi ruangan sudah cukup memadai hanya dari segi kenyamanan bagi masyarakat pelapor masih belum terpenuhi.
 - e. SDM yang baik, sarana dan prasarana operasional masih merupakan kendala untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja kepolisian.
 - f. SPK sebagai "gerbang utama" pelaporan di Polres dan Polsek sudah berjalan cukup baik, tetapi sebagai "pusat pengawasan dan pengendalian" belum cukup baik.
 - g. Koordinasi SPK dengan Satuan Fungsi pada umumnya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih sering ada kendala dalam rentang kendali, fungsi, peran dan tugas.
 - h. Kemampuan berkomunikasi insani (*human communication*) anggota SPK, terutama yang baru lulus masih banyak yang belum baik.
 - i. Biaya pengobatan dan perawatan atau visum, merupakan hambatan bagi anggota SPK jika membawa korban luka ke rumah sakit, karena sampai saat ini menjadi tanggung jawab anggota yang membawanya.
 - j. Perbaikan kesejahteraan personil dan keluarganya merupakan tindakan yang ditunggu setiap anggota polisi dari para pimpinannya.
 - k. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan pendapat dari anggota yang sudah lama bertugas (lebih dari 5 tahun), program pendidikan SPN saat ini tidak menghasilkan lulusan yang "siap pakai", sebab sebagian besar lulusan walaupun sudah melalui proses magang (5 bulan) dengan pembulatan (1 bulan), kinerjanya masih belum memenuhi harapan.
 - l. Masih banyak anggota Polri yang menganggap SPK merupakan "tempat pelatihan" atau "tempat pembinaan", padahal jika menelaah piranti-lunaknya, anggota SPK harus merupakan orang yang profesional dan berdedikasi tinggi.

9. Saran-Saran

- a. Proses pembelajaran dan pembinaan anggota agar dilakukan secara rutin, berkala, dan berjenjang, untuk meningkatkan

- kinerja dan profesionalitas anggota SPK.
- b. Proses bimbingan dan konseling dari pimpinan Polri di Polres/Polsek harus dilakukan secara komprehensif untuk memacu inovasi dan motivasi anggota.
 - c. Jika ada anggota yang bermasalah, maka penyelesaiannya jangan dengan cara dipindah-tugaskan, tetapi
 - 1) Harus ditelaah dulu akar permasalahannya.
 - 2) Lakukan penyuluhan dan pembinaan agar menjadi anggota yang baik, berdedikasi, dan profesional.
 - d. Di ruang SPK agar ada perwakilan anggota Picket Fungsi, seperti yang dilakukan di Polres Bekasi (Polda Metro Jaya), Polres Tanjung Jabung Barat (Polda Jambi), dan Polres-Polres di Polda Sulawesi Tenggara, sehingga masyarakat pelapor bisa dilayani secara langsung dan terintegrasi sesuai dengan persoalannya. Hal ini diperlukan untuk mencerminkan SPK sebagai "gerbang pelaporan" dan "pusat pengawasan dan pengendalian", selain untuk efisiensi dan efektifitas
 - e. Untuk mengatasi kesenjangan peran pengawas dan pengendali dari Ka SPK pada Satuan Fungsi, karena pada DSPP Keputusan Kapolri nomor Pol. : KEP/7/I/2005, pangkat dan eselon Ka SPK lebih rendah dari Ka Satfung, Pimpinan Polri di Polres harus selalu melakukan penyuluhan dan pembinaan lintas fungsi secara rutin dan berkala.
 - f. Keputusan Kapolri nomor Pol. : KEP/7/I/2005 perlu direvisi.
 - g. Proses pembelajaran dan pelatihan yang rutin, berkala, dan berjenjang kepada anggota SPK, harus dilakukan dengan menjalin kerja sama institusional.
 - h. Kerja-sama instansional Polres dengan Pemda Tingkat II harus dijalin dengan baik dalam upaya pengadaan dana pengobatan dan perawatan maupun visum korban laka lantas atau penganiayaan.

- i. Program pendidikan SPN agar dikembalikan menjadi 11 bulan, dengan pendidikan kepolisian diberikan pada 8 bulan pertama, sedangkan 3 bulan terakhir pendidikan komunikasi insani dan sosiologi masyarakat. Demikian juga dengan pendidikan Akpol, sebaiknya pendidikan kepolisian diberikan pada 5 semester pertama,

Sedangkan 1 semester terakhir adalah pendidikan komunikasi insani dan sosiologi masyarakat.

- j. Pemberian insentif dan penghargaan kepada anggota yang berprestasi agar dilakukan secara berkala dan berjenjang.
- k. Program "call center" yang diintegrasikan dengan sistem "local area networking" (LAN), dengan "server" di SPK, seperti di Polres Ciamis (Polda Jawa Barat) agar ditumbuhkan dengan baik dan komprehensif, karena sistem ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dan komunikasi antar SPK dengan Satfung.
- l. Sistem pelaporan di polsek – Polsek kota dan kota besar, sebaiknya menggunakan sistem "intra-net", seperti di Polsek Kota Cilegon (Polda Banten).

Jakarta, Desember 2005

Tim Peneliti :

1. KBP. Drs. Sumarno
2. KBP. Drs. Syahrir
3. Penata Atris Amirudin
4. Penda Gusfar Zamzuri
5. Penda Sosianti
6. Mulyana MS

TIPS HIDUP SEHAT

DEWASA ini makanan organik sedang hangat dibicarakan. Jenis makanan yang satu ini diyakini dapat menyehatkan tubuh dan menghindarkan serangan penyakit. Tak heran, di tengah maraknya gaya hidup sehat di kalangan masyarakat-terutama di kota-kota besar-makanan organik juga menjadi alternatif makanan yang kian digemari.

Keunggulan makanan organik terletak pada proses produksi dan pengolahannya. Makanan organik seperti buah-buahan, sayuran, atau daging hanya sedikit atau bahkan tidak menggunakan bahan-bahan kimia sama sekali, seperti misalnya *Pestisida*.

Berbeda halnya dengan makanan konvensional (non organik) yang dalam proses pertumbuhannya banyak dibantu oleh bahan kimia karena prosesnya yang menggunakan teknologi modern seperti pestisida dan pupuk buatan. Berbagai penelitian mengatakan, bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dalam jangka panjang akan *mengendap* di dalam tubuh dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Itulah sebabnya, walaupun harga makanan organik ini cukup mahal, tetap saja banyak orang memburunya. Alasan lain banyak orang mengkonsumsi makanan organik yaitu karena kesadaran lingkungan. Karena tidak menggunakan *pestisida* dan *pupuk buatan*, lingkungan menjadi lebih terpelihara dan tanah menjadi lebih subur dan tidak terkontaminasi zat kimia.